



KABUPATEN/KOTA BANGKA BARAT

PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO  
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 04  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA  
NO 2 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang :
- a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desatahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5539 );Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan, Menti Desa, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140.8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK07/2017, Nomor 116/Tahun 2017 , Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelerasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang roritas Dana Desa Tahun 2020;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2020 petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan

- Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 7 seri A);
19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor Tahun 2019 Tentang Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor Seri );
  20. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/208/1.6.1.1/2020 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Untuk Dana Tambahan Tunjangan Kedudukan dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020;
  21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Peubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 15 Seri A);
  22. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 10 Seri A);
  23. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
  24. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka

- Barat Tahun Anggaran 2019( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 21 Seri A ));
  26. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 5 Seri E );
  27. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri D);
  28. Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/145/1.22.02/2016 Tentang Penetapan Rekening Milik Desa Se-Kabupaten Bangka Barat Sebagai Rekening Kas Desa Penerima Dana Kelompok Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016;
  29. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);
  30. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 27 Seri D);

31. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
32. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri E ) Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
33. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
34. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
35. Peraturan Desa Airbelo Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 ( Lembaran Desa Airbelo Tahun 2016 Nomor 01 Seri B);
36. Peraturan Desa Airbelo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2018 ( Lembaran Desa Airbelo Nomor 05 Seri B );

37. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Air Belo Nomor 03 Seri B)
38. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Desa Air Belo Nomor 02 Seri C );
39. Peraturan Desa Air Belo Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga ( Lembaran Desa Air Belo Nomor 05 Seri B );
40. Peraturan Kepala Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 03 Seri A);
41. Peraturan Desa Air Belo Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Air Belo Nomor 08 Seri A ;
42. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/294/II/2020,tentang penetapan besaran>Nama Desa penerima dan petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Da'i Bina Umat Desa se-Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NO 2  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	3.062.000,00
b. Transfer	Rp	1.995.247.469,00
c. Lain lain Pendapatan yang sah	Rp	195.550.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.193.859.469,00</b>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.172.080.320,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	401.714.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	89.550.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	15.900.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp	396.809.250,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.183.577.955,00</b>
<b>Surplus/(Desfisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>(101.524.425,00)</b>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.588.133,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	175.000.000,00
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp</b>	<b>85.411.867,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>		
<b>Tahun Berkenan</b>	<b>Rp</b>	<b>22.194.032,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Air belo

Ditetapan di Air Belo  
Pada tanggal 21 Desember 2020  
KEPALA DESA AIR BELO

  
BENY ASBANDI

Diundangkan di Air Belo  
Pada Tanggal 21 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA

YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2020 NOMOR 01 SERI A